Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dinamika Politik Fatimiyah di Bawah al-Afdhal Shahanshah Menghadapi Seljuk dan Pasukan Salib dalam Perebutan Yerusalem (1098–1099 M)

Intan Indrawati
UIN Sunan Ampel Surabaya
intanindrawati0105@gmail.com

Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Al-Afdhal Shahanshah merupakan wazir Dinasti Fatimiyah yang memegang kekuasaan secara *de facto* dan terlibat langsung dalam perebutan Yerusalem, sebuah kota yang pada tahun 1098-1099 menjadi arena persaingan antara Fatimiyah, Seljuk, dan pasukan Salib. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji biografi dan masa kekuasaan al-Afdhal sebagai wazir, memetakan kondisi politik Yerusalem, dan menganalisis dinamika politik al-Afdhal dalam perebutan kota tersebut. Penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan sumber primer berupa *al-Kāmil fī al-Tārīkh* karya Ibn al-Athīr, *Wafayāt al-Aʿyān* karya Ibn Khallikan, dan terjemahan kronik William of Tyre. Pendekatan sejarah politik digunakan dengan teori elite politik Gaetano Mosca dan realisme politik Hans J. Morgenthau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik al-Afdhal dalam perebutan Yerusalem ditentukan oleh perhitungan kekuasaan dan kepentingan. Fragmentasi internal Seljuk pasca-kematian Tutush dimanfaatkan al-Afdhal untuk merebut Yerusalem dari keluarga Artuq, amir Dinasti Seljuk pada 1098 M, sekaligus menjalin komunikasi diplomatik dengan pasukan Salib guna menekan Seljuk. Namun, ketika pasukan Salib berbalik mengancam Yerusalem, al-Afdhal beralih dari langkah diplomatik ke langkah militer, meski Yerusalem telanjur jatuh tahun 1099 dan pasukannya yang mencoba merebutnya kembali juga kalah di Ascalon.

Kata kunci: *al-Afdhal Shahanshah, Fatimiyah, Pasukan Salib, Seljuk, dan Yerusalem*.

PENDAHULUAN

Akhir abad ke-11 M merupakan periode krusial bagi Dinasti Fatimiyah dalam mempertahankan eksistensi politik dan otoritas keagamaannya di kawasan Syam. Sebagai kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang berpusat di Kairo, Fatimiyah sejak lama menempatkan Yerusalem dan wilayah Syam secara umum sebagai bagian penting dari proyek politik-keagamaannya, mengingat kota tersebut menjadi simbol legitimasi

kekhalifahan Ismailiyah di hadapan otoritas Sunni-Abbasiyah yang dipengaruhi oleh Dinasti Seljuk (Brett, 2017: 191-92). Sepanjang paruh kedua abad ke-11 M, dominasi Fatimiyah atas Syam terus tergerus oleh ekspansi Seljuk yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut, sehingga memaksa Fatimiyah untuk terus mencari peluang guna merebut kembali pengaruhnya. Situasi ini kian rumit dengan munculnya ekspedisi militer Eropa yang dikenal sebagai Perang Salib pertama yang diserukan oleh Paus Urbanus II pada Konsili Clermont tahun 1095 M dengan dalih membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim (Hitti, 1970: 636).

Dalam konteks inilah sosok al-Afdhal Shahanshah bin Badr al-Jamali tampil sebagai figur sentral yang menentukan arah kebijakan Fatimiyah. Ia mewarisi jabatan wazir dari ayahnya, Badr al-Jamali. al-Afdhal memegang kendali *de facto* atas pemerintahan Fatimiyah pada masa Khalifah al-Mustansir, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis menyangkut kebijakan militer dan diplomasi di Syam. Sebagai wazir yang mengendalikan kekuasaan riil di tangannya, al-Afdhal memandang perebutan kembali Yerusalem sebagai langkah penting untuk mengembalikan wibawa dan pengaruh Fatimiyah yang selama ini tergerus oleh dominasi Seljuk (Brett, 2017: 229-31). Kesempatan tersebut muncul ketika kekuasaan Seljuk di Yerusalem mengalami pelemahan pada 1098 M, yang kemudian mendorong al-Afdhal untuk mengarahkan kembali perhatian ke wilayah Yerusalem dan berhasil merebutnya di tahun itu. Akan tetapi, keberhasilan tersebut berlangsung ketika Pasukan Salib semakin mendekati Yerusalem pada tahun 1099 M (Brett, 2017: 242). Oleh karena itu, pada periode 1098–1099 M, al-Afdhal sebagai wazir Fatimiyah dihadapkan pada persaingan kepentingan dengan kekuatan Seljuk yang sebelumnya menguasai Yerusalem serta ancaman Pasukan Salib yang berupaya merebut kota tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah biografi al-Afdhal Shahanshah, menggambarkan situasi politik Yerusalem yang melatarbelakangi persaingan perebutan kota tersebut, sekaligus menganalisis dinamika politik al-Afdhal dalam perebutan Yerusalem pada tahun 1098-1099 M. Argumen utama yang diajukan dalam kajian ini adalah bahwa Keberhasilan al-Afdhal dalam merebut Yerusalem dari Seljuk pada 1098 M ditopang oleh fragmentasi internal Seljuk pasca-kematian Tutush, kegagalan mempertahankan kota tersebut setahun kemudian justru terjadi meski al-Afdhal telah menempuh jalur diplomasi, termasuk menawarkan aliansi dan pembagian wilayah kepada pasukan Salib, serta mengirimkan bala bantuan besar ke Ascalon, yang menunjukkan

bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada ketepatan momentum dan keputusan politik, bukan pada ketiadaan kekuatan militer semata.

Kajian mengenai al-Afdhal Shahanshah pernah dilakukan oleh Ahmed Zaki Hassan, Rafat Mohamed Elnabarawi, dan Shaaban Samir Abdelrazik dalam artikel "Contributions of the Fatimid Vizier al-Afdhal Shahanshah to Internal Politics and Architectural Structures (487-515 AH/1094-1121 AD)" *Minia Journal of Tourism and Hospitality Research* Vol. 15, No. 2, 2023. Kajian tersebut menyoroti kedudukan jabatan wazir sebagai salah satu posisi terpenting dalam struktur negara Fatimiyah setelah kekhalifahan, yang pada masa Fatimiyah awal minim kekuasaan riil dan rentan terhadap pemecatan, penahanan, penyitaan harta, penyiksaan, pembunuhan, hingga pelarian, sebelum berkembang pada masa Fatimiyah akhir hingga pengaruhnya setara dengan khalifah sendiri serta menekankan kontribusi al-Afdhal dalam politik internal dan peninggalan arsitektural keagamaan seperti Jami' al-Fila, Masjid al-Rasd, dan Masjid Imam Zayn al-'Abidin sepanjang masa jabatannya. Persamaan dengan artikel ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sosok al-Afdhal Shahanshah sebagai wazir Fatimiyah. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan kontribusi al-Afdhal dalam politik internal dan peninggalan arsitektural keagamaan seperti Jami' al-Fila, Masjid al-Rasd, dan Masjid Imam Zayn al-'Abidin sepanjang masa jabatannya secara umum, sementara artikel ini membahas secara khusus dinamika politik al-Afdhal dalam episode perebutan Yerusalem antara Fatimiyah, Seljuk, dan pasukan Salib pada periode 1098–1099 M

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah dengan sudut pandang sejarah politik, yang ditempuh melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.(Abdurrahman, 2011: 101) Rujukan primer yang dipakai antara lain al-Kāmil fī al-Tārīkh karya Ibn al-Athīr, Wafayāt al-A‘yān karya Ibn Khallikān, serta terjemahan kronik William of Tyre, yang diperkaya dengan berbagai sumber sekunder yang relevan. Dari segi analisisnya, kajian ini memanfaatkan teori elite politik Gaetano Mosca untuk mengamati posisi al-Afdhal sebagai bagian dari kelompok penguasa (ruling class) Fatimiyah dalam mempertahankan dan menjalankan kekuasaan (Mosca, 1939: 50), serta teori realisme politik Hans J. Morgenthau guna membedah kalkulasi kepentingan dan logika kekuasaan (power politics) yang melandasi setiap keputusan strategis al-Afdhal dalam perebutan Yerusalem (Morgenthau, 1948: 13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi al-Afdhal Shahanshah dan Masa Kekuasaanya menjadi Wazir Fatimiyah

Al-Afdhal Shahanshah bernama lengkap Abu al-Qasim Shahanshah bin Badr al-Jamali. Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti. Al-Afdhal sendiri merupakan putra Badr al-Jamali, seorang tokoh militer sekaligus wazir Fatimiyah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Khalifah al-Mustansir. Kedudukan politik al-Afdhal tidak dapat dipisahkan dari posisi ayahnya yang sebelumnya telah membangun kekuasaan politik dan militer yang kuat di Mesir (Khallikān, 1972: 448-49).

Badr al-Jamali sendiri berasal dari Armenia dan pada awalnya merupakan seorang mamluk. Ibn Khallikān menjelaskan bahwa Badr al-Jamali memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, keberanian, serta keteguhan dalam menjalankan pemerintahan. Ia dipanggil ke Mesir ketika pemerintahan al-Mustansir mengalami kelemahan dan kekacauan, dan setelah tiba di Kairo pada 466 H/1073–1074 M, ia dipercaya mengelola urusan pemerintahan dengan kewenangan yang sangat luas yang meliputi urusan militer, hakim, dan dai hingga memperoleh gelar Amir al-Juyush (Panglima Segala Pasukan). Badr al-Jamali meninggal pada 487 H / 1094 M (Khallikān, 1972: 449).

Setelah kematian Badr al-Jamali, kedudukannya sebagai wazir dan pengaruh politik tersebut diteruskan oleh putranya, al-Afdhal Shahanshah. Ibn Khallikan menggambarkan al-Afdhal sebagai sosok yang memiliki kemampuan mengatur pemerintahan dan ketajaman dalam mengambil keputusan. Pengaruhnya semakin kuat setelah wafatnya Khalifah al-Mustansir. al-Afdhal menempatkan al-Musta'li sebagai khalifah, mengesampingkan kakaknya yang lebih tua, Nizar bin al-Mustansir. Nizar menolak keputusan tersebut dan memberontak, namun berhasil dipadamkan oleh al-Afdhal pada 488 H / 1095 M yang mana peristiwa tersebut memperkuat posisi al-Afdhal sekaligus memicu konflik berkepanjangan dengan kelompok pendukung Nizar di kalangan Ismailiyah yang dikenal dengan Nizariyah (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 497-98).

Kekuasaan al-Afdhal juga meluas ke kebijakan Fatimiyah terhadap Syam dan Palestina. Pada akhir abad ke-11 M, wilayah tersebut menjadi kawasan persaingan antara Fatimiyah, kekuatan Turki Seljuk, dan Tentara Salib. Al-Afdhal berusaha mengembalikan pengaruh Fatimiyah di Yerusalem, salah satunya melalui perebutan kembali Yerusalem dari kekuasaan Seljuk yang dipimpin oleh keluarga Artuq yaitu Sukman bin Artuq dan Ilghazi bin Artuq, pada 491 H / 1098 M (Khallikān, 1972: 449-

50). Menurut Ibn Khallikan, al-Afdhal mengambil alih Yerusalem pada hari Jumat, lima hari sebelum berakhirnya Ramadan 491 H / awal Agustus 1098 M, kemudian menempatkan seorang pejabat Fatimiyah untuk mengelola kota tersebut. Akan tetapi, penguasaan ini berlangsung singkat, dimana ketika Tentara Salib bergerak ke selatan menuju Yerusalem dan akhirnya menaklukan kota tersebut pada 22 Sya'ban 492 H / 15 Juli 1099 M (Khallikān, 1972: 450).

Kendali demikian, kekuasaan al-Afdhal atas pemerintahan Fatimiyah tidak berhenti. Sebagaimana dicatat Ibn al-Athīr dalam al-Kāmil fī al-Tārīkh pada wafatnya Khalifah al-Musta'li wafat pada tahun 17 Safar 495 H / 11 Desember 1101 M setelah masa kekhalifahan sekitar tujuh tahun dua bulan, dengan al-Afdhal sebagai pengendali pemerintahannya sepanjang masa itu. Sepeninggal al-Musta'li, tampuk kekhalifahan diteruskan oleh putranya, Abu Ali al-Manshur, yang dibaiat pada hari wafatnya sang ayah dalam usia baru lima tahun satu bulan empat hari dan menjadikannya khalifah termuda dalam sejarah Fatimiyah dengan gelar al-Amir bi-Ahkamillah. Karena usianya yang sangat belia, bahkan disebutkan belum mampu menunggang kuda sendiri, kendali penuh pemerintahan kembali dipegang oleh al-Afdhal, yang menurut Ibn al-Athīr mengelola urusan negara dengan sebaik-baiknya, dan terus memegang posisi tersebut hingga masa pemerintahan al-Amir ((Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 46).

Selain peranannya dalam bidang politik, ia juga memberikan kontribusi penting di berbagai bidang lain sepanjang masa jabatannya. Dalam bidang administrasi dan ekonomi, al-Afdhal mempercayakan pengelolaan urusan negara kepada stafnya, al-Ma'mun al-Bata'ihi, yang sejak 1107 M diangkat sebagai kepala staf dan berhasil melaksanakan reformasi perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjamin kelancaran pembayaran gaji militer. Dalam bidang keagamaan, al-Afdhal membangun sejumlah sarana ibadah di Mesir, di antaranya Jami' al-Fila (Masjid Gajah) di kawasan Fustat dengan biaya sekitar 6.000 dinar emas, serta turut berkontribusi dalam pembangunan Masjid al-Rasd dan Masjid Imam Zayn al-'Abidin (Al-Nabarawy, Abdel Razek, dan Hassan, 2023: 65-67).

Selain pembangunan sarana ibadah, perhatian al-Afdhal juga terlihat dalam pengelolaan pertanian dan irigasi. Ia melakukan penataan terhadap sistem iqta setelah para pemilik tanah dari kalangan tentara mengeluhkan perbedaan pendapatan dengan para pangeran pemegang tanah iqta. Al-Afdhal kemudian melakukan pendataan wilayah dan mendistribusikan kembali tanah-tanah tersebut kepada tentara dan pangeran. Ia juga

mengatur kepemilikan tanah serta menetapkan kharaj atau pajak tanah bagi para pengelolanya. Bagi tanah yang sebelumnya terlantar, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolahnya dengan keringanan pajak selama beberapa tahun (Al-Nabarawy dkk., 2023: 63-64).

Dalam bidang irigasi, al-Afdhal memerintahkan penggalian Khalij Abu al-Manja yang dimulai pada 6 Sya'ban 506 H/ 18 Januari 1112 M dan selesai dalam waktu dua tahun. Kanal tersebut memberikan manfaat bagi lahan-lahan pertanian yang dialirinya. Ia juga mendorong pengembangan pertanian melalui pengujian jenis gandum baru dan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan lahan secara maksimal. Dengan demikian, kebijakan al-Afdhal tidak hanya berkaitan dengan pengendalian politik, tetapi juga mencakup penataan administrasi tanah, perpajakan, pertanian, dan irigasi sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi Mesir (Al-Nabarawy dkk., 2023: 64).

Kekuasaan panjang al-Afdhal ini pada akhirnya berakhir secara tragis. Ibn al-Athīr mencatat bahwa pada 23 Ramadan 515 H / 11 Desember 1121 M, al-Afdhal dibunuh ketika hendak menuju *Khazanah al-Salam* untuk membagikan harta kepada para prajurit, sebagaimana kebiasaannya pada hari-hari raya. Ketika rombongan pasukan yang mengiringinya menimbulkan debu yang mengganggunya, al-Afdhal memerintahkan mereka menjauh dan melanjutkan perjalanan hanya bersama dua pengawal. Di Pasar al-Sayaqilah, dua orang menyerangnya dengan pisau, disusul seorang ketiga yang menikam pinggangnya dari belakang hingga ia jatuh dari tunggangannya. Ketiga penyerang tersebut kemudian dibunuh oleh para pengikutnya yang segera kembali (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 207-08).

Ibn al-Athīr turut mengisahkan bahwa pembunuhan tersebut sesungguhnya bukan peristiwa spontan, melainkan hasil rencana Khalifah al-Amir sendiri, yang hubungannya dengan al-Afdhal telah memburuk. Rencana awal al-Amir untuk membunuh al-Afdhal di dalam istana dicegah oleh sepupunya, Abu al-Maimun Abd al-Majid yang kelak menjadi penguasa Mesir menggantikan al-Amir, dengan pertimbangan bahwa tindakan semacam itu akan mencoreng nama baik pemerintahan mengingat pengabdian al-Afdhal dan ayahnya selama lebih dari lima puluh tahun, serta akan membuat wazir pengganti kelak senantiasa curiga dan waspada terhadap khalifah. Sebagai gantinya, disarankan agar al-Amir menjanjikan kedudukan wazir kepada Abu Abdullah bin al-Bata'ihi yang merupakan orang kepercayaan al-Afdhal yang mengetahui seluk-beluk urusannya dengan imbalan mengatur pembunuhan al-Afdhal secara tersembunyi, sementara khalifah kelak

dapat berpura-pura berkabung dan menuntut balas atas kematiannya agar tidak dikaitkan dengan peristiwa tersebut (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 208).

Rencana inilah yang kemudian dijalankan hingga menyebabkan kematian al-Afdhal. Setelah wafat, jenazah al-Afdhal dibawa ke kediamannya, dan khalifah datang menyampaikan belasungkawa sekaligus menanyakan harta kekayaannya. Al-Afdhal sebelumnya telah menjelaskan bahwa harta yang diketahui umum berada dalam catatan Abu al-Hasan bin Usamah, sementara harta yang tersembunyi diketahui oleh Ibn al-Bata'ihi. Harta kekayaan al-Afdhal disebutkan sedemikian besar sehingga khalifah tinggal di kediamannya sekitar empat puluh hari untuk mendata dan mengangkutnya, termasuk berbagai barang berharga dan benda langka yang disebut tidak ada bandingannya. Anak-anak al-Afdhal kemudian ditangkap. Ia wafat dalam usia lima puluh tujuh tahun, setelah memegang jabatan wazir selama 28 tahun yang mencakup akhir pemerintahan al-Mustansir, seluruh masa al-Musta'li, hingga sebagian masa al-Amir. Ibn al-Athīr mencatat bahwa kalangan Ismailiyah sesungguhnya tidak menyukai al-Afdhal, karena dianggap mengabaikan kepentingan imam mereka serta tidak menindak kelompok Ahlussunnah, bahkan mengizinkan mereka menampakkan keyakinan dan berdebat secara terbuka dengan kalangan Ismailiyah (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 208-209).

Al-Afdhal Shahanshah memiliki beberapa orang anak, di antaranya Sama' al-Mulk Husayn dan Abu Ali Ahmad yang kemudian dikenal sebagai Kutayfat. Sama' al-Mulk Husayn dipercaya sebagai wakil Al-Afdhal pada 1115 M / 509 H dan dipersiapkan untuk melanjutkan kedudukannya dalam pemerintahan. Selain itu, putri Al-Afdhal dinikahkan dengan Khalifah al-Amir bi-Ahkam Allah. Setelah Al-Afdhal terbunuh, anak-anaknya yang telah dewasa ditangkap dan dipenjarakan, sementara harta kekayaan keluarganya disita. Beberapa tahun kemudian, Abu Ali Ahmad atau Kutayfat dibebaskan dan diangkat sebagai wazir. Ia kemudian mengambil alih kekuasaan di Mesir untuk waktu singkat sebelum dibunuh pada 8 Desember 1131 M / 16 Muharram 526 H (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 209).

Kondisi Politik Yerusalem yang Melatarbelakangi Terjadinya Perebutan

Yerusalem sendiri awalnya berada di bawah kekuasaan Fatimiyah sejak penaklukan wilayah Syam bagian selatan pada masa al-Mu'izz, tidak lama setelah Fatimiyah menguasai Mesir pada 969 M. Kota ini menjadi bagian dari wilayah Syam

yang dikuasai Fatimiyah dan relatif stabil pada masa al-Aziz Billah (975-996 M), ketika kendali Fatimiyah atas Palestina dan Syam semakin kokoh (Pruitt, 2017: 42). Yerusalem juga menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi, sehingga posisinya penting secara keagamaan maupun politik (Armstrong, 2005: 22).

Kestabilan tersebut mulai terganggu pada masa al-Hakim bi Amrillah (996-1021 M). Kebijakannya yang ekstrem, seperti pembatasan terhadap komunitas non-Muslim dan penghancuran Gereja Makam Kudus pada 1009 M, merusak hubungan Fatimiyah dengan umat Kristen di Yerusalem dan dunia Kristen di luar Mesir (Tyre, 1943: 65). Meskipun kebijakan itu kemudian dilonggarkan, kerusakan politik dan citra yang ditimbulkannya tidak pernah benar-benar pulih. Kerapuhan itu semakin nyata pada masa al-Mustansir Billah (1036-1094 M). Khalifah yang naik takhta pada usia tujuh tahun ini praktis hanya menjadi simbol, sementara kekuasaan riil dipegang oleh ibunya, para wazir, dan faksi-faksi militer yang saling bersaing. Perebutan pengaruh antarwazir dan pertempuran antarpasukan Berber, Turki, dan Sudan menyita perhatian serta sumber daya pemerintah di Kairo, sehingga Syam yang jauh dari pusat kekuasaan kurang terlindungi (Hindi, 2024: 34-35).

Pada saat yang sama, Seljuk sedang berekspansi ke arah barat. Menurut Ibn al-Athir dalam al-Kāmil fī al-Tārīkh, pada 463 H / sekitar 1070-1071 M, Atsiz ibn Uvaq seorang panglima dinasti Seljuk menguasai al-Ramlah dan Baitul Maqdis (Yerusalem), lalu menguasai Damaskus Pada Zulkaidah 468 H dan khutbah Jumat dibacakan atas nama khalifah Abbasiyah al-Muqtadi bi Amrillah. Itu menjadi khutbah terakhir atas nama khalifah Fatimiyah di Damaskus. Atsiz juga melarang lafaz azan *hayya ala khair al-amal*, tetapi kemudian memerintah penduduknya dengan buruk. Hal ini dapat dipahami bahwa setelah menaklukan Damaskus, Dinasti Seljuk telah menguasi dan memerintah wilayah Syam yang di dalamnya terdapat Yerusalem (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 410).

Menurut Ibn al-Athir, Pemerintahan Atsiz berlangsung keras. Ketika serangannya ke Mesir gagal sekitar 469 H / 1077 M, penduduk Yerusalem dan Damaskus dituduh berpihak kepada Fatimiyah, sehingga Atsiz menindas mereka, dan Yerusalem sendiri disebut mengalami pembantaian serta penjarahan. Pada 471 H / 1079 M, Atsiz dibunuh oleh Tutush, saudara Sultan Malik Shah, yang kemudian menguasai wilayah Syam dan saat itulah dinamakan Seljuk Syam, salah satu dari lima cabang Dinasti Seljuk pasca Malik Shah. Yerusalem lalu diserahkan kepada Artuq ibn Aksab, seorang amir Turkmen, dan setelah ia wafat kota itu dipegang oleh putra-putranya, Ilghazi dan Suqman.

Pergantian penguasa Turkmen di Yerusalem ini berlangsung ketika Seljuk memasuki masa kemunduran setelah Sultan Malik Shah wafat pada 485 H / 1092 M (Al-Athīr, 1987-a, jil. 8: 468-69, 418, dan 482-83).

Sepeninggalnya, terjadi perebutan takhta di kalangan keluarga dan para amir. Istrinya, Turkan Khatun, mengangkat putranya yang masih kecil, Mahmud, sebagai sultan, sementara kelompok lain mendukung putra Malik Shah yang lebih tua, Barkyaruq (Bosworth, 1988). Perang saudara pun pecah dan melibatkan Tutush, penguasa Syam dan saudara Malik Shah, yang ikut menuntut kekuasaan. Tutush tewas dalam pertempuran melawan Barkyaruq pada tahun 1095 M. Kekuasaannya di Syam kemudian terbagi antara kedua putranya, Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus, yang saling bersaing.(Köhler, 2013: 16) Akibatnya, kesatuan politik Seljuk di Syam runtuh dan wilayah itu terpecah menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil yang saling bermusuhan. Ilghazi dan Suqman, yang kekuasaannya bergantung pada dukungan Tutush, tidak lagi memiliki pelindung yang utuh (Hillenbrand, 1999: 44).

Lemahnya kontrol atas Yerusalem ini juga berdampak pada keamanan peziarah Kristen yang datang ke kota tersebut. William of Tyre, sejarawan Latin masa Perang Salib, menggambarkan bahwa para peziarah Yunani dan Latin yang tiba setelah menempuh perjalanan berbahaya ditahan di gerbang kota oleh para penjaga, yang menolak memberi izin masuk sebelum mereka membayar sekeping emas sebagai upeti. Peziarah yang kehilangan hartanya di perjalanan tidak mampu membayar. Menurut William, lebih dari seribu orang di antara mereka meninggal di luar kota karena kelaparan dan kekurangan pakaian, sehingga penduduk Kristen setempat menanggung beban tambahan. Peziarah yang berhasil masuk pun tetap terancam diludahi, ditampar, atau dicekik diam-diam, sehingga penduduk Kristen Yerusalem menemani mereka ke tempat-tempat suci (Tyre, 1943, vol. 1: 81-82).

William juga menyebut bahwa ketika ibadah berlangsung, orang Turki menerobos gereja, menduduki altar, menginjak-injak perlengkapan ibadah, dan memukuli para rohaniwan. Patriark bahkan diseret dari tempat duduknya dan berulang kali dipenjara tanpa alasan. William kemudian menceritakan Peter The Hermit, imam dari keuskupan Amiens, yang menyaksikan keadaan itu dan bertemu Patriark Simeon (Tyre, 1943, vol. 1: 82-83). Menurut William, Simeon menyatakan bahwa harapan bantuan dari Kekaisaran Bizantium sudah tipis karena Bizantium telah kehilangan lebih dari separuh wilayahnya, sehingga ia berharap bantuan dari Barat dan memberi Peter surat untuk paus serta para

raja Barat (Tyre, 1943: 86). Kabar dari Yerusalem ini menjadi salah satu bahan seruan bantuan yang berkembang di Eropa hingga Paus Urbanus II menyatakan Perang Salib I pada Konsili Clermont tahun 1095 M, Seruan Paus Urbanus II tersebut melahirkan gerakan militer pasukan Salib yang bergerak ke Timur untuk menaklukan Yerusalem (Juirah dan Tajuddin, 2024: 45).

Pada saat yang sama, Seljuk di Syam terpecah oleh persaingan Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus, sedangkan Yerusalem berada dibawah keluarga Artuq, yaitu Ilghazi dan Suqman, para amir Turkmen yang mengabdi kepada penguasa Seljuk di Syam yang telah tercerai-berai. Kondisi ini membuka peluang bagi Fatimiyah untuk merebut kembali Yerusalem. Bagi al-Afdhal, yang memegang kendali *de facto* Fatimiyah, kota itu penting secara politik dan keagamaan.

Dinamika Politik Al-Afdhal dalam Perebutan Kota Yerusalem (1098-1099 M)

Sebagai wazir dan penguasa de facto Fatimiyah, al-Afdhal Shahanshah menentukan langkah Fatimiyah dalam perebutan Yerusalem pada tahun 1098-1099 M, yang melibatkan Fatimiyah, Seljuk, dan pasukan Salib. Dinamika tersebut dibahas melalui tiga tahap, yaitu perhitungan politik al-Afdhal sebelum merebut Yerusalem, al-Afdhal dalam Merebut Yerusalem dari keluarga Artuq bawahan Seljuk, serta politik al-Afdhal dalam menghadapi pasukan Salib.

Perhitungan Politik al-Afdhal Sebelum Merebut Yerusalem

Perhitungan politik al-Afdhal tidak terlepas dari melemahnya kekuatan Seljuk di Syam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah Tutush terbunuh pada 488 H/1095 M, wilayah kekuasaannya terpecah antara Ridwan di Aleppo dan Duqaq di Damaskus. Persaingan antara kedua penguasa tersebut menyebabkan kekuatan Seljuk di Syam terfragmentasi dan tidak lagi mampu bertindak sebagai satu kekuatan politik yang solid. Perpecahan tersebut memberikan ruang bagi Fatimiyah untuk kembali memperluas pengaruhnya di wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan atau pengaruh mereka. Oleh karena itu, melemahnya dan terpecahnya kekuatan Seljuk menciptakan kesempatan bagi al-Afdhal untuk mengambil kembali wilayah strategis yang sebelumnya lepas dari pengaruh Fatimiyah (Köhler, 2013: 17-19).

Selain memperhatikan kondisi Seljuk, al-Afdhal juga harus memperhitungkan munculnya pasukan Salib di Syam. Kedatangan pasukan Salib menciptakan perubahan

baru dalam keseimbangan kekuatan regional. Pasukan Salib memang merupakan kekuatan Kristen yang bergerak ke wilayah Muslim, tetapi pada tahap awal kedatangannya mereka juga berhadapan dengan kekuatan Seljuk yang menjadi pesaing Fatimiyah. Pertimbangan tersebut terlihat dari adanya komunikasi antara Fatimiyah dan pasukan Salib ketika mereka berada di Syam saat mengepung Antiokhia sejak 20 Oktober 1097 M dan berhasil merebutnya pada 3 Juni 1098 M. Selama pengepungan tersebut, penguasa Mesir mengirim utusan untuk menawarkan hubungan damai dan kemungkinan persekutuan karena orang Turki dipandang sebagai ancaman bagi Mesir (Abu-Munshar, 2010: 49-50). Utusan Fatimiyah menjanjikan persahabatan dan bahwa utusan pasukan Salib kemudian berangkat ke Kairo bersama mereka. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara Fatimiyah dalam hal ini al-Afdhal dan pasukan Salib memang berlangsung, meskipun bentuk dan tujuan hubungan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan adanya aliansi formal (Abu-Munshar, 2010: 50-51).

William of Tyre memberikan penjelasan mengenai kepentingan politik di balik hubungan tersebut. Menurutnya, permusuhan lama antara penguasa Mesir dan kekuatan-kekuatan di Timur, terutama yang berkaitan dengan persaingan wilayah, menyebabkan penguasa Mesir melihat perkembangan pasukan Salib sebagai sesuatu yang dapat melemahkan lawannya. Kekalahan Kilij Arslan di Nicaea dan keberhasilan pasukan Salib mengepung Antiokhia memberikan keuntungan bagi Fatimiyah karena tekanan terhadap Seljuk semakin besar (Tyre, 1943: 74). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa al-Afdhal tidak hanya mengandalkan kekuatan militer Fatimiyah dalam menghadapi Seljuk, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan memanfaatkan kekuatan pihak lain. Pasukan Salib dapat memberikan tekanan terhadap Seljuk dari arah Syam, sementara Fatimiyah tetap mempertahankan kepentingannya di Mesir dan Yerusalem.

Dalam kerangka realisme Morgenthau, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan politik tidak selalu didasarkan pada kesamaan agama, tetapi pada kepentingan dan kekuasaan (Morgenthau, 1948: 13). Fatimiyah dapat berkomunikasi dengan pasukan Salib karena keberadaan mereka untuk sementara dapat membantu menekan Seljuk. Namun, ketika pasukan Salib semakin kuat dan perundingan tidak menghasilkan komitmen yang mengikat, al-Afdhal perlu mempertimbangkan tindakan yang dapat menjamin kepentingan Fatimiyah secara langsung. Oleh karena itu, setelah Antiokhia jatuh, kebutuhan untuk menguasai Yerusalem menjadi semakin mendesak. Jika pasukan Salib bergerak menuju selatan dan mencapai Yerusalem lebih dahulu,

kesempatan Fatimiyah untuk mengembalikan kota tersebut ke dalam kekuasaannya akan semakin kecil (Köhler, 2013: 17). Pertimbangan tersebut mendorong al-Afdhal memimpin pasukan Fatimiyah menuju Yerusalem pada 1098 M.

Al-Afdhal dalam Merebut Yerusalem dari Keluarga Artuq Bawahan Seljuk

Pelemahan kekuatan Seljuk di Syam menjadi peluang bagi al-Afdhal untuk merebut kembali Yerusalem ke dalam kekuasaan Fatimiyah pada 1098 M. Pada saat itu, Yerusalem berada di bawah penguasaan keluarga Artuq dalam kekuasaan Seljuk. Kota tersebut dipertahankan oleh Sukman dan Ilghazi, putra Artuq, bersama Sunj dan Yaquti. Dengan merebut kota tersebut, al-Afdhal tidak hanya memperoleh kembali wilayah yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Fatimiyah, tetapi juga mengurangi pengaruh Seljuk di Syam. Hal ini penting bagi Fatimiyah karena Yerusalem memiliki kedudukan strategis sebagai wilayah yang berdekatan dengan Mesir sekaligus menjadi jalur menuju Syam (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 19).

Menurut Ibn al-Athir, Al-Afdhal kemudian mengepung Yerusalem dengan mengerahkan pasukan Fatimiyah dalam jumlah besar. Pasukan tersebut menggunakan lebih dari empat puluh manjaniq untuk menyerang pertahanan kota dan merusak beberapa bagian temboknya. Sebenarnya, rakyat di dalam kota berupaya untuk mempertahankan Yerusalem yang menyebabkan pengepungan berlangsung selama lebih dari empat puluh hari. Setelah melalui proses tersebut, Yerusalem akhirnya dapat dikuasai oleh pasukan Fatimiyah pada 1098 M (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 19).

Setelah kota berhasil dikuasai, al-Afdhal mengambil langkah yang menunjukkan adanya pertimbangan politik terhadap pihak yang sebelumnya menguasai Yerusalem. Sukman dan Ilghazi tidak dibunuh atau dipenjarakan, tetapi diperlakukan dengan baik, diberikan hadiah, dan diizinkan meninggalkan kota. Sukman kemudian menuju Edessa, sedangkan Ilghazi pergi ke Irak (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 19). Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya al-Afdhal untuk mengakhiri penguasaan keluarga Artuq atas Yerusalem tanpa menciptakan konflik lanjutan dengan memberikan jaminan keamanan dan penghargaan, al-Afdhal dapat mengambil alih kota sekaligus mengurangi kemungkinan perlawanan dari penguasa sebelumnya.

Penguasaan Yerusalem kemudian diperkuat dengan penunjukan Iftikhar al-Dawla sebagai pejabat yang mewakili pemerintahan Fatimiyah di kota tersebut (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 19). Penempatan seorang pejabat menunjukkan bahwa tujuan al-Afdhal bukan

semata-mata memenangkan pengepungan, tetapi juga mempertahankan hasil penaklukan melalui pengendalian administratif.

Politik al-Afdhal dalam Menghadapi Pasukan Salib pada Perebutan Yerusalem

Setelah kemenangan Pasukan Salib di Antiokhia pada 3 Juni 1098, hubungan antara pihak Fatimiyah dan Pasukan Salib mengalami perubahan yang signifikan. Dalam catatan William of Tyre, ia menyebutkan bahwa sebelumnya yang dikirim al-Afḍal dengan sungguh-sungguh berusaha memperoleh dukungan dari para pemimpin Pasukan Salib dalam menghadapi kesombongan kekuatan Turki dan Persia, sebagaimana tampak dari kontak diplomatik yang terjalin saat pengepungan Antiokhia. Namun, setelah kekuatan Seljuk mengalami kemunduran beruntun dan jatuhnya Yerusalem ke Fatimiyah, sikap Fatimiyah berubah total (Tyre, vol. 1, 1943: 325-26).

Para utusan yang kembali dari Mesir kali ini membawa pesan yang jauh berbeda nadanya, di mana seolah-olah al-Afḍal memberi kemurahan besar dengan mengizinkan para peziarah Kristen tak bersenjata memasuki Yerusalem dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar dua atau tiga ratus orang, dan kembali dengan aman setelah menunaikan ibadah. Tawaran tersebut memperlihatkan upaya al-Afḍal untuk mengatur hubungan dengan Pasukan Salib melalui jalur diplomatik, sekaligus membatasi keberadaan militer mereka di wilayah kekuasaan Fatimiyah yang baru saja dipulihkan (Tyre, 1943, vol. 1: 326).

Namun para pemimpin Pasukan Salib menolak keras tawaran tersebut. Mereka tidak bersedia memasuki Yerusalem secara bertahap dalam rombongan kecil sebagaimana diusulkan al-Afdhal sebaliknya, mereka menegaskan bahwa seluruh pasukan akan bergerak bersama-sama menuju Yerusalem, bahkan disertai ancaman terhadap kerajaan penguasa Mesir. Penolakan ini memperlihatkan bahwa hubungan yang sebelumnya dapat diarahkan melalui kepentingan bersama dalam menghadapi Seljuk kini mulai berubah menjadi persaingan langsung. Bagi Fatimiyah, kehadiran Pasukan Salib yang bergerak sebagai satu kekuatan militer tunggal menuju Yerusalem menjadi ancaman nyata terhadap kekuasaan yang baru saja mereka bangun kembali (Tyre, 1943, vol. 1: 326).

Setelah menolak tawaran tersebut, Pasukan Salib melanjutkan pergerakan menuju Yerusalem di bawah kepemimpinan sejumlah tokoh utama, antara lain Raymond IV of Toulouse, Godfrey of Bouillon, Robert II of Flanders, Robert of Normandia, dan Tancred.

Sementara itu, Bohemond dari Taranto tetap berada di Antiokhia setelah menguasai kota tersebut dan menjadi penguasa disana. Mereka terlebih dahulu bergerak menuju Ma'arrat al-Nu'man dan mengepung kota tersebut hingga berhasil menguasainya pada Desember 1098. Setelah itu, mereka bergerak menuju Arqa dan mengepungnya selama beberapa bulan, tetapi tidak berhasil menaklukkannya. Dalam keadaan tersebut, Munqidh, penguasa Shayzar, mengirim utusan dan mengadakan perdamaian dengan Pasukan Salib. Mereka kemudian bergerak menuju Homs dan melakukan pengepungan hingga Janah al-Dawlah, penguasa kota tersebut, memilih berdamai. Dari Homs, Pasukan Salib melanjutkan perjalanan melalui jalur al-Nawafir menuju Acre, tetapi tidak berhasil menguasai kota tersebut. Setelah melewati wilayah pesisir Syam, Pasukan Salib kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju Yerusalem (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 17). Pada 7 Juni 1099, mereka tiba di sekitar Yerusalem dan mulai mengepung kota yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Fatimiyah (Asbridge, 2010: 132-33).

Setelah tiba di Yerusalem pada 7 Juni 1099 M/492 H, Pasukan Salib segera mengepung kota yang berada di bawah kekuasaan Fatimiyah. Berdasarkan catatan William of Tyre, pasukan tersebut dipimpin oleh Godfrey of Bouillon, Raymond IV of Toulouse, Robert II of Flanders, Robert of Normandia, dan Tancred. Pengepungan berlangsung sekitar 38–40 hari dalam kondisi sulit karena keterbatasan air dan belum tersedianya peralatan pengepungan yang memadai. Pasukan Salib kemudian memperoleh kayu dari wilayah sekitar untuk membangun menara pengepungan, ketapel, dan alat pendobrak, sedangkan pihak Fatimiyah di bawah Iftikhar al-Dawla memperkuat pertahanan kota (Tyre, 1943, vol. 1: 360-65).

Meskipun menghadapi pengepungan dalam waktu yang cukup panjang, Iftikhar al-Dawla tidak memperoleh bantuan langsung dari al-Afdhal. Al-Afdhal baru menghimpun pasukan setelah menerima berita mengenai jatuhnya Yerusalem. Tidak adanya bantuan langsung dari al-Afdhal kepada Iftikhar al-Dawla menunjukkan keterlambatan mobilisasi militer Fatimiyah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pertahanan Yerusalem pada saat pengepungan sepenuhnya bergantung pada kekuatan yang berada di dalam kota. Setelah serangkaian serangan, Pasukan Salib berhasil menembus pertahanan Yerusalem pada pagi hari Jumat, 22 Syaban 492 H / 15 Juli 1099 M (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 20). Ibn al-Athir mencatat bahwa setelah memasuki kota, Pasukan Salib membunuh penduduk dan melakukan penjarahan selama sekitar satu minggu. Ia juga menyebut bahwa lebih dari 70.000 orang dibunuh di Masjid al-Aqsa,

termasuk imam, ulama, orang-orang saleh, dan para ahli ibadah. Sebagian Muslim yang bertahan di Mihrab Dawud memperoleh jaminan keselamatan dan kemudian meninggalkan kota menuju Ascalon (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 20-21).

Jatuhnya Yerusalem kemudian mendorong al-Afdhal untuk mengambil langkah militer secara langsung yang sebelumnya dia lebih banyak mengambil langkah diplomatit dalam menghadapi pasukan Salib. Dalam catatan Ibn al-Athir, setelah menerima berita mengenai jatuhnya Yerusalem dan pembunuhan penduduk Muslim, al-Afdhal, yang bergelar Amir al-Juyush, menghimpun pasukan dan bergerak menuju Ascalon pada Ramadan 492 H / Desember 1099 M (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 21).

Sesampainya di Ascalon, al-Afdhal mengirim utusan kepada Pasukan Salib untuk mengecam tindakan mereka di Yerusalem sekaligus menyampaikan ancaman. Namun, setelah utusan tersebut kembali, Pasukan Salib bergerak menuju posisi pasukan Mesir dan melakukan serangan mendadak pada pagi hari 12 Agustus 1099 M / 22 Ramadan 492 H. Ibn al-Athir menjelaskan bahwa pasukan al-Afdhal tidak mengetahui kedatangan Pasukan Salib dan belum siap bertempur. Mereka bahkan baru dipanggil untuk menaiki kuda dan mengenakan perlengkapan perang ketika serangan telah dimulai. Akibatnya, pasukan Mesir mengalami kekalahan dan banyak di antara mereka terbunuh, sementara harta, senjata, dan perlengkapan di perkemahan dirampas (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 21).

Sebagian pasukan yang melarikan diri bersembunyi di pepohonan, tetapi Pasukan Salib membakar sebagian pohon tersebut sehingga orang-orang yang berada di dalamnya tewas. Ibn al-Athir tidak memberikan jumlah pasti korban dalam Pertempuran Ascalon, sehingga angka korban tertentu tidak sebaiknya dinisbatkan kepadanya. Al-Afdhal sendiri kemudian melarikan diri ke Ascalon dan kembali ke Mesir bersama orang-orang terdekatnya. Setelah mengalahkan pasukan Mesir, Pasukan Salib mengepung Ascalon. Penduduk kota kemudian menawarkan pembayaran untuk menghentikan pengepungan sebesar jumlah 12.000 dinar. namun, pasukan Salib meminta 20.000 dinar, hal ini disetujui masyarakat Ascalon dan setelahnya Pasukan Salib meninggalkan Ascalon dan kembali ke Yerusalem (Al-Athīr, 1987-b, jil. 9: 21).

KESIMPULAN

Al-Afdhal Shahanshah merupakan wazir Dinasti Fatimiyah yang mewarisi kedudukan politik ayahnya, Badr al-Jamali, dan kemudian memegang kendali

pemerintahan secara *de facto*, sementara khalifah tetap menjadi pemegang legitimasi kekhalifahan. Kondisi tersebut menjadikan al-Afdhal sebagai tokoh penting dalam penentuan kebijakan politik dan militer Fatimiyah. Sementara itu, kondisi politik Yerusalem yang melatarbelakangi terjadinya perebutan tersebut diwarnai persaingan antara Fatimiyah dan Seljuk yang menyebabkan kota tersebut silih berganti berada di bawah kekuasaan kedua dinasti. Sementara itu pasukan Salib sendiri yang membawa semangat Perang suci juga menginginkan tanah itu. Fragmentasi internal Seljuk setelah kematian Tutush pada 1095 M membuka peluang bagi al-Afdhal untuk merebut Yerusalem dari keluarga Artuq pada 1098 M. Dinamika perebutan dan upaya mempertahankan Yerusalem pada 1098–1099 M memperlihatkan bahwa perhitungan kekuasaan dan kepentingan menjadi pertimbangan penting dalam keputusan strategis al-Afdhal. Ia berupaya memanfaatkan komunikasi diplomatik dengan Pasukan Salib ketika mereka mengepung Antiokhia, tetapi setelah kota tersebut jatuh, Pasukan Salib melanjutkan ekspansi ke selatan dan menjadi ancaman langsung bagi Yerusalem. Namun begitu Antiokhia jatuh dan Pasukan Salib justru bergerak sebagai kekuatan tunggal menuju selatan, hubungan yang semula didasarkan pada kepentingan bersama melawan Seljuk berbalik menjadi persaingan langsung, dimana tawaran diplomatik al-Afdhal untuk membatasi kehadiran mereka lewat akses ziarah terbatas ditolak, dan keterlambatan mobilisasi militer Fatimiyah yang baru bergerak setelah Yerusalem jatuh pada 15 Juli 1099 M yang kemudian berujung pada kekalahan pasukan al-Afdhal di Ascalon pada Agustus 1099 M. Kegagalan al-Afdhal mempertahankan Yerusalem bukan disebabkan oleh ketiadaan kekuatan militer Fatimiyah, melainkan oleh ketidaktepatan momentum dan keputusan politik dalam merespons pergeseran cepat keseimbangan kekuatan di Syam, sehingga keberhasilan merebut kota tersebut pada 1098 M tidak serta-merta menjamin keberlangsungan kekuasaan Fatimiyah atasnya setahun kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam*. Penerbit Ombak.

Abu-Munshar, M. Y. (2010). Fāṭimids, Crusaders and the fall of Islamic Jerusalem: Foes or allies? *Al-Masāq*, 22(1), 45–56. https://doi.org/10.1080/09503110903549939

Al-Athīr, I. (t.t.-a). *Al-Kāmil fī al-tārīkh* (Jilid. 8, ditahqiq oleh M. Y. al-Daqqāq). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Athīr, I. (t.t.-b). *Al-Kāmil fī al-tārīkh* (Jilid. 9, ditahqiq oleh M. Y. al-Daqqāq). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Nabarawy, R. M. M., Abdel Razek, S. S., & Hassan, A. Z. (2023). Contributions of the Fatimid vizier Al-Afdal Shahanshah to internal politics and architectural structures (487–515 AH/1094–1121 AD). *Minia Journal of Tourism and Hospitality Research*, 15(2), 54–78.

Armstrong, K. (2005). *Jerusalem: One city, three faiths*. Ballantine Books.

Asbridge, T. (2010). *The crusades: The authoritative history of the war for the Holy Land*. HarperCollins.

Bosworth, C. E. (1988). Barkīāroq. *Encyclopaedia Iranica*, 3(8), 800–801.

Brett, M. (2017). *The Fatimid empire*. Edinburgh University Press.

Hillenbrand, C. (1999). *The crusades: Islamic perspectives*. Edinburgh University Press.

Hindi, H. W. (2024). Political systems in the era of Al-Mustansir Billah Al-Fatimid (427–487 AH/1035–1094 AD). *Al-Adab Journal*, 2(148), 19–42. https://doi.org/10.31973/qwk0n197

Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs: From the earliest times to the present* (Edisi ke-10). Macmillan Publishers.

Juirah, & Tajuddin, F. N. (2024). Perang Salib dan akibat yang ditimbulkan terhadap peradaban Islam. *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1). https://doi.org/10.35905/carita.v3i1.10663

Khallikān, I. (1972). *Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ al-zamān* (Jilid. 2, ditahqiq oleh I. ʿAbbās). Dār Ṣādir.

Köhler, M. A. (2013). *Alliances and treaties between Frankish and Muslim rulers in the Middle East: Cross-cultural diplomacy in the period of the Crusades* (Edisi revisi, disunting oleh K. Hirschler). Brill.

Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. Alfred A. Knopf.

Mosca, G. (1939). *The ruling class*. McGraw-Hill.

Pruitt, J. (2017). The Fatimid holy city: Rebuilding Jerusalem in the eleventh century. The Medieval Globe, 3(2), 35–56. https://doi.org/10.17302/TMG.3-2.3

Tyre, W. of. (1943). *A history of deeds done beyond the sea* (Vol. 1, diterjemahkan oleh E. A. Babcock & A. C. Krey). Columbia University Press.